

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA TNI AD YANG MELAKSANAKAN PERKAWINAN DENGAN MENGUNAKAN WALI ADHAL DI JAJARAN KODAM XVII/CENDERAWASIH

Harry A. Tuhumury, SH.,MH¹

Abstrak : Proses pengajuan perkara Wali *Adhal* sama dengan pengajuan permohonan pada umumnya, yaitu di mulai dari tahap pengajuan perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pendaftaran perkara, penetapan majelis hakim, penunjukan panitera sidang, penetapan hari sidang, dan pemanggilan pihak-pihak yang bersangkutan untuk hadir dalam persidangan perkara tersebut pada waktu yang ditentukan. Pelaksanaan Perkawinan bagi anggota TNI AD yang melalui Wali *Adhal* belum secara rinci diatur dnegan baik termasuk mengenai mekanisme dan perlindungan hukum bagi anggota tersebut.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anggota TNI AD, Perkawinan, Wali Adhal

PENDAHULUAN

Praktek Wali *Adhal* ini tidak lagi menjadi persoalan yang asing dalam konteks hukum islam. Praktek Wali *Adhal* tidak sedikit yang dijadikan langkah alternatif oleh para pelaku nikah karena kondisi orang tua yang masih mempertimbangkan keyakinan terhadap adat istiadat fenomena Wali *Adhal* ini tidak saja dilatarbelakangi oleh suatu hal yang syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syar'i misalnya anak gadis tersebut sudah dilamar oleh orang lain dan lamaran tersebut belum dibatalkan, atau berbeda Agama dengan calon suaminya

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

(Misalnya beragama Kristen/Katolik), atau orang yang fasik (Zina, dan suka Mabuk), atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami, dan sebagainya². Dalam menjalankan kehidupannya manusia tentu ingin melanjutkan keturunan, oleh karena itu manusia harus mengikatkan diri dengan pasangannya melalui suatu ikatan yaitu Perkawinan³.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu⁴.

Ketentuan ini menjadi dasar hukum berlakunya hukum perkawinan agama termasuk Islam di Indonesia sebagai peraturan khusus di samping peraturan umum yang di atur dalam Undang-undang perkawinan khususnya untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam. Islam seperti agama lainnya, mempunyai aturan dan hukum tersendiri dalam mengatur dan membina umatnya. Perkawinan tidak hanya didasarkan kepada akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami isteri yang sah, membentuk keluarga yang bahagia dan

91 ² Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta. Pustaka Amani, 1989). Hlm. 90-

³http://www.pa-kualatungkal.net/index.php?option=com_content&view=article&id=89:wali-perkara&Itemid=103.

adhal&catid=16:info-

⁴ Amir Syarifuddin Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Jakarta Putra garafika Hal 40.

kekal.

Sahnya suatu perkawinan dalam hukum Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi Syarat-syarat dan rukunnya. Dalam kaitanya dengan rukun nikah. Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun nikah terdiri atas, harus ada⁵ :

1. Calon Suami.
2. Calon Isteri,
3. Wali Nikah
4. Dua orang Saksi dan
5. Ijab dan Kabul

Kedudukan wali dalam suatu perkawinan adalah sangat penting karena sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah terhadap seorang wanita adalah hak bagi wali nasab. Seorang Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *Adhal* atau enggan. Dalam hal Wali *Adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Tanpa adanya wali maka suatu pernikahan tidak sah, akan tetapi karena semakin majunya kehidupan manusia dan kurang pahaman manusia dalam masalah perkawinan terutama bagi umat islam maka banyak bermunculan perkawinan-perkawinan atau terjadinya perkawinan yang kurang memenuhi rukun dan syarat-syarat

⁵ Selamat Abidin dan H. Aminudin, *Fiqih Muna ka hat*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999),

perkawinan akibatnya terjadi perkawinan yang tidak mempunyai wali yang tepat yang akan menikahkannya. Dalam Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, **Abu Daud Ibnu Majah** dan **Tirmidzi** Artinya: Dari **Aisyah**, bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

“Siapapun diantara wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal.” (**H.R. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi**). Dengan demikian, tiap-tiap wanita yang akan menikah tanpa izin walinya, adalah batal, batal, batal, batal, tiga kali kata-kata batal itu diucapkan Rasulullah untuk menguatkan kebatalan nikah tanpa izin wali pihak perempuan. Akan tetapi timbul permasalahan seperti yang penulis kemukakan yaitu adanya wali yang enggan (*Adhal*) menikahkan calon mempelai.

Keengganan Wali Nasab dalam menikahkan dapat disebabkan karena adanya alasan tertentu misalnya wali yang tidak memenuhi syarat- syarat untuk menjadi seorang wali atau dikarenakan tidak/kurang setuju karena status sosial, beda agama, pernah mempunyai masalah sosial, status duda dan sebagainya⁶.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim Pasal 2 Ayat (1) dinyatakan bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang

⁶ H. Sulaiman Rasyd, 1998, Fiqih Islam. Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, Halm 383

berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau *Adhal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Ayat (1) juga disebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan dapat ditunjuk menjadi Wali Hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk membangun kehidupan keluarga yang bahagia di dambakan oleh setiap orang.

Dari perkara di atas undang-undang tidak merumuskan sedetil- detilnya hal-hal yang harus dipertimbangan hakim. Maka hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga memutuskan perkara tersebut dengan seadil-adilnya. Dalam kenyataannya di Indonesia sering kali ijab kabul dalam suatu perkawinan dilaksanakan oleh pejabat Kantor Urusan Agama yang seharusnya dilakukan oleh wali nikah yang berhak menikahkan. Hal ini perlu diteliti lebih jauh mengapa itu semua harus dilakukan oleh pejabat Kantor Urusan Agama.

Bagi setiap Pengawai Negeri Sipil termasuk Prajurit TNI, suatu perkawinan dapat berlangsung dengan adanya suatu surat ijin dari pejabat yang berwenang. Perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi setiap prajurit dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan ketentuan ini diatur dengan keputusan Panglima, sebagaimana diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit. Ketentuan ini mengakomodir pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Setiap pernikahan, perceraian dan rujuk dilaksanakan menurut ketentuan/tuntutan agama yang dianut oleh Prajurit yang bersangkutan dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian seluruh ketentuan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan dengan pernikahan, perceraian dan rujuk bagi Prajurit TNI, tetap berlaku bagi seluruh Prajurit sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit.

Berkaitan dengan ketentuan mengenai Wali bagi Prajurit muslim yang akan menikah sebenarnya tidak diatur secara spesifik, dengan demikian ketentuan mengenai perwalian ini mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit hanya

mempersyaratkan adanya Surat Persetujuan ayah/wali calon isteri sebagai salah satu lampiran dalam persyaratan Surat Permohonan Ijin Nikah.

Untuk melengkapi penulisan Skripsi ini penulis melakukan turun lapangan Wawancara langsung dengan Sertu LK Anggota TNI AD Kodam XVII/Cenderawasih dan Sdri. RB calon istri dari Sertu LK yang melangsungkan Perkawinan dengan menggunakan Wali *Adhal*, menghadap ke kantor hukum Kodam XVII/Cenderawasih untuk menanyakan tentang Perlindungan hukum bagi anggota TNI AD yang melangsungkan Perkawinan dengan menggunakan Wali *Adhal* dan menghadap Kantor Binaan Mental Kodam XVII/Cenderawasih untuk mencari data tentang jumlah Anggota TNI AD di Jajaran Kodam XVII/Cenderawasih yang melangsungkan perkawinan dengan menggunakan Wali *Adhal*.

Dari Uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi anggota TNI AD yang melaksanakan perkawinan dengan menggunakan Wali *Adhal* di jajaran Kodam XVII/Cenderawasih. Oleh karena itu penulis akan mengkaji pelaksanaan perkawinan melalui Wali *Adhal* bagi Anggota TNI AD di Jajaran Kodam XVII/ Cenderawasih, serta upaya perlindungan hukum bagi Anggota TNI AD yang melaksanakan perkawinan dengan menggunakan Wali *Adhal* karena tidak ada persetujuan dari Wali

Nashab.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau Pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (زواج) dan zawaj (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam Al-quran dan Hadits Nabi⁷. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menterjemahkan suatu perkawinan itu sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Dasar hukum berlakunya ketentuan tata cara perkawinan agama termasuk Islam di Indonesia sebagai peraturan khusus di samping pengaturan umum yang di atur dalam Undang-Undang perkawinan.

Selain dari pelaksanaan perkawinan yang sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya tersebut, lebih jauh dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan mengamanatkan agar tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah agar mempunyai kedudukan yang kuat menurut hukum.

⁷ Amir Syarifudin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta Kharisma Putra Utama. Hal 35

Tujuan Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 hanya menjelaskan secara singkat bahwa suatu perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami isteri dan anak-anak dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman keluarga bersama (ayah, ibu dan anak-anak)⁸.

Dalam ketentuan Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Pengertian umum dari kalimat sakinah, mawadah dan rahmah yakni damai, tenang dan tentram dalam rajut cinta dan kasih sayang nan sejuk dan abadi. Secara historis-filologis, kalimat hasil rangkaian tiga kata utama yang merupakan istilah khas Arab- Islam yang dirujuk dari QS. Ar-Rum ayat 21, yaitu ⁹:

1. Sakinah artinya tenang, tentram
2. Mawaddah artinya cinta, harapan
3. Rahmah artinya kasih sayang

⁸ Abdulkadir Muhamad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal 85.

⁹ <https://ilmukuilmumu.wordpress.com/2011/06/28/arti-sakinah-mawadah-warahmah/>

Karena itu, kedamaian dan kesejukan berumah tangga akan terbina dengan baik, harmonis serta penuh cinta kasih dan semangat berkorban bagi yang lain. Pada saat bersamaan jiwa dan ruh rahmah tersebut akan membingkainya dengan dekap kasih dan sapaan lembut sang Khalik. Ada beberapa tujuan dari diisyaratkannya perkawinan atas umat Islam, diantaranya adalah¹⁰:

- a. Untuk mendapatkan keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari Surat an-Nisa ayat 1 :

“Wahai sekalian manusia bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan istri- istri; dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan.”

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau gajirah umat manusia bahkan juga gajirah bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.

- b. Untuk mendapatkan keluarga yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari Firman Allah dalam Surat ar-Rum ayat 21 sebagaimana dikutip :

“Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

¹⁰ Amir Syarifudin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta Kharisma Putra Utama. Hal 46-47

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan; namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami isteri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.

Pengertian dan Penyebab adanya Wali *Adhal*

Definisi wali *Adhal* cukup beragam, tetapi penulis coba menukil salah satu definisi yang dikemukakan oleh Wahbah al Zuhailiy yang mendefinisikan wali *Adhal* sebagai:

“Penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baliqh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara’ dilarang.”¹¹

Ketentuan mengenai wali *Adhal* dalam hukum perkawinan Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu¹²:

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

¹¹ Wahbah al Zuhailiy, *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu*, Juz 9, Dar al-Fikr, Beirut, 1997, h. 6720,

¹² *ibid*

Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa *Adhal*-nya wali merupakan salah satu syarat atau keadaan dibolehkannya wali hakim sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Untuk menyatakan *Adhal*-nya seorang wali, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita

2. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Ketentuan mengenai wali *Adhal* dalam peraturan ini sama dengan ketentuan dalam peraturan tersebut di atas
3. Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan mengenai wali *Adhal* dalam hukum Islam diatur dalam Pasal 23. Substansinya pada dasarnya sama dengan kedua Peraturan Menteri Agama tersebut di atas.

Proses Perkawinan melalui Wali Hakim dalam hal adanya Wali *Adhal*.

Perkawinan yang dilakukan melalui Wali Hakim dalam hal adanya Wali Adal pada prinsipnya sama dengan Perkawinan pada umumnya. Sesuatu hal yang membedakan adalah kewajiban bagi calon mempelai untuk mengajukan permohonan penetapan Wali *Adhal* kepada Pengadilan Agama setempat sebelum Perkawinan ini dilaksanakan.

Pemeriksaan permohonan wali *Adhal* di Pengadilan Agama/

Mahkamah Syar'iah pada dasarnya sama dengan pemeriksaan permohonan atau perkara voluntair lainnya. Perbedaannya adalah perlunya didengar keterangan dari wali calon perempuan (Pemohon) untuk mengetahui keengganan dan alasannya. Salah satu pertanyaan yang sering muncul dalam konteks ini adalah bagaimana jika orang tua (wali) tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut?

Mengenai hal ini, dapat merujuk kepada salah satu kaidah:

“Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”

Konsekuensi ketidakhadiran wali Pemohon dalam persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara patut adalah gugurnya hak jawab dan yang bersangkutan dapat dikategorikan zalim (membangkang) terhadap proses peradilan yang sah. Akan tetapi, hal tersebut tidak serta merta menjadikan hakim mengkualifikasi wali tersebut *Adhal*, karena Pemohon tetap harus membuktikan bahwa alasan penolakan walinya tidak dibenarkan oleh syar'iat'.

Proses Pelaksanaan Perkawinan anggota TNI AD dengan menggunakan Wali *Adhal*.

Bahwa peran dan tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara, maka setiap Prajurit diperlukan ketaatan dan disiplin terhadap semua peraturan-peraturan yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan Pasal 63 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia maka perlu menetapkan Peraturan Panglima TNI tentang Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit.

Sebagaimana tertera dalam Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit pada pokoknya menyatakan : “setiap pernikahan, perceraian dan rujuk dilaksanakan menurut ketentuan dan tuntutan agama yang dianut oleh Prajurit yang bersangkutan dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Tata Cara Pernikahan.

Prajurit TNI yang akan melaksanakan pernikahan harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Izin nikah hanya diberikan apabila pernikahan yang akan dilakukan itu tidak melanggar hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Untuk ini perlu adanya Pernyataan/Pendapat pejabat agama Angkatan yang bersangkutan.

Izin nikah pada prinsipnya diberikan kepada prajurit yang bersangkutan jika pernikahan itu memperlihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon suami istri yang bersangkutan dan tidak akan membawa pengaruh atau akibat yang dapat merugikan kedinasannya.

Surat izin nikah hanya berlaku selama enam bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkannya. Dalam hal Izin nikah telah diberikan, sedangkan pernikahan tidak jadi dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan pembatalan itu kepada pejabat yang memberikan izin tersebut disertai dengan alasan-alasan secara tertulis.

Setelah pernikahan dilaksanakan, maka salinan surat nikah dari lembaga yang berwenang, serta salinan surat izin nikah harus diserahkan oleh yang bersangkutan kepada pejabat personalia di kesatuannya, guna menyelesaikan administrasi personel dan keuangan.

Penolakan pemberian izin atas permohonan nikah dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan pemberitahuan kepada yang bersangkutan secara tertulis dengan disertai alasan-alasannya. Penolakan pemberian izin dimaksud dilakukan apabila :

- a. Tabiat, kelakuan dan reputasi calon suami/istri yang bersangkutan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah (norma) kehidupan bersama yang berlaku dalam masyarakat.

- b. Ada kemungkinan, bahwa pernikahan itu akan dapat merendahkan martabat TNI atau mengakibatkan kerugian terhadap nama baik TNI ataupun Negara baik langsung maupun tidak langsung.
- c. Persyaratan kesehatan tidak dipenuhi.

Prosedur Permohonan Wali *Adhal*.

Pemeriksaan permohonan wali *Adhal* di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah pada dasarnya sama dengan pemeriksaan permohonan atau perkara voluntair lainnya. Perbedaannya adalah perlunya didengar keterangan dari wali calon perempuan (Pemohon) untuk mengetahui keengganan dan alasannya. Salah satu pertanyaan yang sering muncul dalam konteks ini adalah bagaimana jika orang tua (wali) tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut? Mengenai hal ini, dapat merujuk kepada salah satu kaidah: "Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"

Konsekuensi ketidakhadiran wali Pemohon dalam persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara patut adalah gugurnya hak jawab dan yang bersangkutan dapat dikategorikan zalim (membangkang) terhadap proses peradilan yang sah. Akan tetapi, hal tersebut tidak serta merta menjadikan hakim mengkualifikasi wali tersebut *Adhal*, karena Pemohon tetap harus membuktikan bahwa

alasan penolakan walinya tidak dibenarkan oleh syara'. Dalam pemeriksaan permohonan wali *Adhal*, ada tiga hal yang perlu dibuktikan oleh Pemohon, yaitu:

1. Apakah benar wali nasab yang berhak menikahkannya *Adhal* (enggan)?
2. Apakah di antara Pemohon (calon mempelai perempuan) dan calon mempelai laki-laki telah ada persetujuan atau kesepakatan untuk menikah?
3. Apakah calon mempelai laki-laki kafa'ah (sederajat, seimbang) dengan Pemohon dalam hal agama, ekonomi, status sosial, dan sebagainya?

Ketiga hal tersebut patut dibuktikan oleh Pemohon. Ketiga elemen di atas merupakan unsur yang bersifat kumulatif, dalam arti bahwa jika salah satu unsur tidak dapat dibuktikan atau tidak terpenuhi, maka seorang wali tidak dapat ditetapkan sebagai *Adhal*.

Dalam mengajukan penetapan Wali *Adhal*, calon mempelai harus memenuhi beberapa persyaratan permohonan sebagai berikut¹³ :

- a. Surat penolakan dari KUA.
- b. Surat keterangan adanya halangan/kurang persyaratan dari KUA.
- c. Foto kopy KTP Pemohon (calon suami dan istri) yang dimaterai Rp 6.000,- (*NAZEGELEN*) dan distempel Kantor Pos Besar.

¹³ <http://www.pa-kotamadiun.go.id/index.php/transparansi-perkara/tahap-tingkat-pertama/syarat-permohonan-wali-adhal>

- d. Foto kopy kartu keluarga Pemohon yang dimaterai Rp 6.000, (*NAZEGELEN*) dan distempel Kantor Pos Besar.
- e. Foto kopy buku nikah orang tua Pemohonan yang dimaterai Rp 6.000,- (*NAZEGELEN*) dan distempel Kantor Pos Besar.
- f. Foto kopy akte cerai (bila orang tua telah bercerai) yang dimaterai Rp 6.000,- (*NAZEGELEN*) dan distempel Kantor Pos Besar.
- g. Foto kopy akta kelahiran yang dimaterai Rp 6.000,- (*NAZEGELEN*) dan distempel Kantor Pos Besar (Asli harus ada).
- h. Membayar panjar biaya perkara Rp 491.000,-

Adapun proses Penetapan bahwa seorang wali telah *Adhal* harus didasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan syari'at. Dalam hal ini, Sayyid Sabiq mengemukakan:

“Adapun jika wali menghalangi karena alasan yang sehat, seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar mitsil, atau ada peminang lain yang lebih sesuai dengan derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain. Karena ia tidaklah dianggap menghalangi.”

Penjelasan Sayyid Sabiq tersebut pada intinya mengkualifikasikan alasan-asalan penolakan wali yang sesuai syariat, sehingga wali tersebut tidak dikategorikan menghalangi (*Adhal*). Alasan penolakan wali yang tidak dikategorikan *Adhal* adalah sebagai berikut:

1. Calon laki-laki yang tidak sepadan dengan calon perempuan (tidak se-kufu')

Sepadan tidaknya antara calon mempelai laki-laki dengan

calon mempelai perempuan tidak hanya didasarkan pada satu faktor tertentu saja, misalnya ekonomi, melainkan didasarkan pada berbagai aspek. Kafa'ah secara bahasa berarti setaraf, seimbang, atau sederajat. Dalam terminologi perkawinan, kafa'ah berarti keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Aksentuasi pada kualifikasi kafa'ah tidaknya antara calon suami dan calon istri adalah keseimbangan dan keselarasan, terutama pada aspek religiusitas, mencakup akidah dan akhlak. Meskipun demikian, aspek lain juga patut menjadi preferensi dalam penilaian kafa'ah tidaknya calon suami dengan calon istri, misalnya dari aspek keturunan, ekonomi, pekerjaan, dan fisik.

2. Maharnya kurang dari mahar mitsil

Mahar merupakan sesuatu yang wajib diadakan dalam suatu akad pernikahan. Mahar harus jelas bentuk harga (nilainya) pada saat dilangsungkannya akad. Mahar mitsil adalah mahar yang besarnya sama dengan besaran mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya. Dalam tatanan masyarakat tertentu, besaran mahar seringkali dipadankan dengan prestise suatu keluarga. Keluarga yang secara sosial dipandang sebagai keluarga terhormat dengan sekalian atribut sosial yang dimilikinya

pada umumnya memiliki besaran mahar yang tinggi pula. Hal ini sepatutnya tidak selaras dengan semangat syar'i, apalagi jika orientasi nilai material yang dijadikan patron dalam menetapkan mahar mitsil. Pun demikian, hal tersebut juga tidak dapat diabaikan begitu saja, karena dalam kenyataan jika jumlah mahar yang ditawarkan tidak sebesar mahar mitsil dapat menimbulkan gejolak atau friksi yang tajam dalam keluarga. Dengan demikian, dalam menilai besaran mahar mitsil, perlu dipakai cara pandang atau persepektif yang luas dengan melihat semua aspek yang terkait di dalamnya.

3. Adanya peminang lain yang lebih sepadan atau sederajat (se-kufu')

Alasan berikut yang tidak dikategorikan sebagai *Adhal* adalah bahwa pada waktu yang sama atau hampir bersamaan, ada peminang lain yang se- kufu' dengan calon mempelai perempuan. Mengenai apa yang dimaksud dengan se-kufu' telah dijelaskan pada bagian lain tulisan ini. Akan tetapi, perlu dicermati bahwa hadirnya peminang lain dalam hal ini tidak boleh menyebabkan wali kehilangan objektivitasnya dalam menilai kualifikasi dari masing-masing peminang.

Sebagai ilustrasi, jika peminang pertama memiliki taraf kualifikasi yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan peminang kedua tidak dapat diartikan secara serta merta bahwa calon

kedua lebih se- kufu' dengan calon mempelai perempuan. Argumentasinya sederhana, ada persoalan "etik" yang melekat dalam kondisi demikian.

Terlebih jika kecenderungan calon mempelai perempuan kepada peminang pertama, maka sangat beralasan pilihan demikian, dan ayah sebagai wali seyogyanya mengapresiasi pilihan anaknya tersebut dengan mengabulkan pinangan pertama. Karena itu, dalam menetapkan kualifikasi peminang mana yang se-kufu' dengan calon mempelai perempuan, seorang ayah patut berhati-hati dan memperhatikan segala hal. Ini pula yang patut dipertimbangkan oleh Hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan penetapan wali *Adhal*.

Dalam penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa penetapan mengenai *Adhal*-nya wali tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan normatif-yuridis sebagaimana dikemukakan di atas. Ada aspek sosiologis dan psikologis yang termuat dalam serangkaian pertimbangan hakim tersebut.

Aspek sosiologis pada umumnya berkaitan dengan pertimbangan hakim melihat kenyataan bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak hanya menjadi dinamika dalam internal keluarga masing-masing calon, tetapi bahkan telah jauh masuk ke dalam struktur dinamika sosial di

lingkungan masyarakatnya.

Hubungan asmara yang dijalin mereka sudah diketahui khalayak dan pada beberapa kasus telah mendapat “restu” atau “persetujuan” secara sosiologis dari masyarakat. Dalam kondisi demikian, menjadi sesuatu yang sangat rumit jika perkawinan yang telah diagendakan keduanya tidak direstui dan diamini oleh keluarga. Bukan tidak mungkin pula akan menimbulkan friksi tajam, tidak hanya antara calon dengan orang tua dan keluarganya, tetapi bahkan dapat melibatkan elemen masyarakat yang sudah terlanjur meyakini bahwa keduanya merupakan pasangan ideal.

Perlindungan Hukum bagi Anggota TNI AD yang melaksanakan Perkawinan melalui Wali *Adhal*.

Sebagaimana tertera dalam Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit pada pokoknya menyatakan : “setiap pernikahan, perceraian dan rujuk dilaksanakan menurut ketentuan dan tuntutan agama yang dianut oleh Prajurit yang bersangkutan dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Secara Prinsip Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit seperti telah dijelaskan dalam Bab Kajian Teori memang tidak mengatur secara rinci mengenai urusan perwalian bagi Prajurit yang akan melakukan pernikahan, ketentuan

yang ada sekedar hanya berkaitan dengan syarat administrasi calon suami/isteri yang akan menikah yakni adanya "Surat persetujuan ayah/wali calon isteri. Dengan demikian seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pernikahan termasuk ketentuan dalam agama mengikat bagi Prajurit. Hal ini juga berlaku bagi Prajurit yang beragama Islam harus juga memenuhi syarat/rukun Islam dalam melakukan suatu pernikahan termasuk masalah perwalian yang menjadi salah satu rukun dalam perkawinan menurut Hukum Islam.

Berkaitan dengan seorang wali yang enggan untuk menikahkan orang yang masuk dalam perwaliannya, ketentuan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit yang menjadi dasar adanya pernikahan bagi Prajurit tidak mengatur secara spesifik. Dengan demikian berkaitan dengan wali yang enggan ini (wali *Adhal*) akan mengacu pada ketentuan hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

Secara Normatif hanya anggota TNI AD dan pasangannya yang telah mendapat ijin formal dari orang tua saja yang dapat memenuhi persyaratan pernikahan untuk kemudian diberi Surat Ijin Menikah oleh Komandan Satuan anggota yang bersangkutan sesuai tataran kewenangan masing-masing.

Apabila terjadi suatu kasus dimana orang tua tidak memberi ijin, maka secara formal tidak dapat dikeluarkan Surat Ijin Menikah.

“Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah apakah pasangan ini tetap tidak boleh menikah? Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan,

Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit tidak secara spesifik mengatur hal ini. Oleh karena itu maka calon mempelai wanita harus mendapatkan penetapan Pengadilan Agama setempat yang menyatakan bahwa walinya *Adhal* atau enggan.

Atas dasar Penetapan Pengadilan Agama ini, maka Komandan Satuan dapat menerbitkan Surat Ijin Perkawinan terhadap anggota TNI AD dan pasangannya tersebut. dengan mendasarkan Penetapan Pengadilan Agama inilah sebagai wujud dari perlindungan hukum bagi anggota TNI AD yang melakukan perkawinan melalui wali *Adhal* dalam hal wali nikah enggan untuk menikahkan.

Penetapan Pengadilan Agama yang menjadi dasar Surat Ijin Perkawinan juga merupakan solusi atas permasalahan hukum yang terjadi. Pengadilan tentu saja mempertimbangkan semua faktor termasuk menanyakan kepada Wali Nikah yang *Adhal* atau enggan untuk menikahkan calon mempelai perempuan dalam perwalian nikahnya. Upaya rekonsiliasi sesama keluarga utamanya dengan orang tua merupakan hal yang mutlak bagi anggota TNI AD dan pasangannya karena hubungan keluarga merupakan suatu faktor penting bagi setiap

anggota TNI AD dalam mendukung pelaksanaan tugasnya sehari-hari.

Secara umum kasus Wali *Adhal* sangat jarang terjadi dalam kehidupan anggota TNI AD khususnya di lingkungan Kodam XVII/Cenderawasih karena biasanya proses perkawinan telah diawali dengan proses pemeriksaan di satuan, pemeriksaan kesehatan, maupun pemeriksaan oleh pejabat agama di Bintaldam XVII/Cenderawasih.

Beberapa Kasus wali *Adhal* yang muncul adalah karena latar belakang agama yang berbeda, misalnya dalam hal calon mempelai wanita pada awalnya non muslim dan baru menjadi seorang mualaf pada saat akan menikah. Sehingga tentu saja calon mempelai perempuan tersebut tidak memiliki wali nashab yang sah dan walaupun ada wali nashab tersebut kebanyakan enggan atau *Adhal* untuk menikahkan dengan pertimbangan menjaga keharmonisan hubungan keluarga.

Dalam kasus lain misalnya juga terjadi adanya ketidaksetujuan orang tua karena melihat adanya calon lain yang mungkin dianggap lebih cocok dibandingkan dengan calon anggota TNI AD. Pada kasus ini calon mempelai perempuan dapat mengajukan penetapan Wali *Adhal* dengan mengungkapkan alasan-alasan yang sah menurut hukum (Islam).

Adapun langkah-langkah yang harus diambil oleh Anggota

TNI AD untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam Permohonan Wali *Adhal*.

- a. Dari segi aturan anggota TNI harus mendudukan diri dalam hukum perkawinan dan hukum perkawinan Islam.
- b. Bahwa Anggota TNI Harus memenuhi semua Prosedur Pengajuan Nikah di kesatuannya dan kantor urusan Agama (KUA) setempat serta melengkapi semua persyaratanya.
- c. Tidak melakukan perbuatan melanggar hukum seperti melakukan Kawin siri, ataupun memalsukan tanda tangan dan memalsukan Surat- surat lainnya.
- d. Upaya persuasif terhadap keluarga calon istri harus tetap dilakukan.

PENUTUP

Kesimpulan

Wali merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah perkawinan. Alasan yang diajukan para wali untuk menolak menikahkan antara lain :

- a. Karena wali tidak setuju dengan calon suami pilihan anaknya.
- b. Karena wali ingin menikahkan anaknya dengan laki-laki yang berpendidikan tinggi.
- c. Karena wali mempunyai calon suami sendiri untuk anaknya.

Proses pengajuan perkara Wali *Adhal* sama dengan pengajuan permohonan pada umumnya, yaitu di mulai dari tahap pengajuan perkara,

pembayaran panjar biaya perkara, pendaftaran perkara, penetapan majelis hakim, penunjukkan panitera sidang, penetapan hari sidang, dan pemanggilan pihak-pihak yang bersangkutan untuk hadir dalam persidangan perkara tersebut pada waktu yang ditentukan. Pelaksanaan Perkawinan bagi anggota TNI AD yang melalui Wali *Adhal* belum secara rinci diatur dengan baik termasuk mengenai mekanisme dan perlindungan hukum bagi anggota tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhamad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta. Pustaka Amani, 1989.

Amir Syarifuddin Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Jakarta Putra garafika.

Amir Syarifudin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta Kharisma Putra Utama.

Amir Syarifudin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta Kharisma Putra Utama.

H. Sulaiman Rasyd, 1998, Fiqih Islam. Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo,

<http://www.pa-kotamadiun.go.id/index.php/transparansi-perkara/tahap-tingkat-pertama/syarat-permohonan-wali-adhal>

http://www.pa-kualatungkal.net/index.php?option=com_content&view=article&id=89:wali-adhal&catid=16:info-perkara&Itemid=103.

<https://ilmukuilmumu.wordpress.com/2011/06/28/arti-sakinah-mawadah-warahmah/>

Selamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqih Muna ka hat*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999.

Wahbah al Zuhaily, *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu*, Juz 9, Dar al-Fikr, Beirut, 1997.